



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

**KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2024-2025
KE PROVINSI JAWA TENGAH (KABUPATEN KLATEN)**

*

*

*

**

**

*

*

*

JAKARTA 2024



LAPORAN
KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2024-2025
KE KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH (KABUPATEN KLATEN)
22-24 AGUSTUS 2024

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik ke Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 dalam rangka meninjau dan menghimpun informasi terkait dengan permasalahan di Bidang Pangan dan Pertanian serta Perikanan. Adapun dasar hukum Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik ke Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, mengacu pada:

1. Peraturan Dewan Perwakilan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI Tanggal 27 Mei 2024.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 19 Agustus 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik ke Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk:

1. Melakukan peninjauan lapangan dan berdiskusi dengan *stakeholder* terkait dengan permasalahan sektor pangan dan pertanian di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
2. Melakukan peninjauan lapangan dan berdiskusi dengan pelaku usaha sektor perikanan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah; serta
3. Mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah terkait dengan permasalahan di sektor pangan dan pertanian serta perikanan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meliputi sektor Pangan dan Pertanian serta Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang I Tahun 2024-2024 ke Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Bapak Ono Surono, S.T. (Anggota Komisi IV/F-PDIP) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

E. LOKASI DAN PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Pelaksanaan Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 22-24 Agustus 2024. Adapun lokasi yang dikunjungi, antara lain:

1. Lahan pertanian di Desa Tumpukan, Kec. Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; serta
2. Kawasan Budi Daya Ikan Air Tawar di Botorejo, Nganjat, Kec. Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

II. GAMBARAN UMUM

A. Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Klaten terdiri dari tiga kota kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Pusat Pemerintahan Kabupaten Klaten berada di Kota Klaten. Luas dari wilayah Kabupaten Klaten

mencapai 655,56 km². Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan, yang terbagi atas 391 desa dan 10 kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Klaten terbentang pada 110°26'14" – 110°47'51" Bujur Timur dan 7°32'19"–7°48'33" Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah yang ada sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah Timur: Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah Barat: Kabupaten Magelang dan kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta); serta
4. Sebelah Selatan: Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Topografi Kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75 meter hingga 160 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 dataran yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi yang membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung;
2. Dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur; serta
3. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Dengan ketinggian dataran yaitu, 3,72% dataran terletak pada ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut. 83,52% persen terletak di ketinggian 100–500 meter dari permukaan air laut dan, 12,76% terletak di ketinggian 500–1.000 meter dari permukaan air laut. Kondisi dataran yang bervariasi tersebut memberikan keuntungan bagi setiap daerahnya. Setiap daerah atau kecamatan di Kabupaten Klaten memiliki ciri khas yang berbeda. Ciri khas tersebut dapat berupa sumber daya alam ataupun yang lainnya. Kecamatan Polanharjo, memiliki sumber daya air yang melimpah, bahkan

potensi sumber daya air ini mampu memberikan pasokan air minum bagi masyarakat sekitar Kabupaten Klaten.

B. Sektor Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah

Subsektor Pertanian menjadi sektor yang memiliki peranan penting di Kabupaten Klaten. Subsektor Tanaman Pangan sebagai salah satu bagian dari sektor pertanian yang berpengaruh terhadap penyediaan bahan pangan di Kabupaten Klaten. Tercatat di Tahun 2022, produksi beras Kabupaten Klaten mencapai 292.102 ton dengan total kebutuhan beras sebanyak 92.016,9 ton. Sementara Tahun 2023, hingga bulan Oktober 2023 produksi beras mencapai 204.558 ton dengan total konsumsi beras mencapai 116.589 ton.

Kemarau panjang tahun sebelumnya melanda Indonesia dan menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Kondisi ini juga mempengaruhi Kabupaten Klaten sebagai salah satu penghasil padi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan informasi media yang dihimpun oleh Komisi IV DPR RI, Kabupaten Klaten mengalami kekeringan di lahan pertanian. 109 ha lahan mengalami kekeringan air, bahkan 333 ha telah mengalami puso. Kekeringan air bersih terjadi di desa-desa lereng Gunung Merapi, wilayah Kecamatan Kemalang dan kekeringan lahan pertanian terjadi di wilayah selatan Klaten. 109 ha lahan pertanian tersebut, berada di 7 desa dengan total luas 92 ha dan 2 desa di Kecamatan Pedan dengan luas 17 ha. Sementara Kondisi puso terjadi di 10 desa wilayah Kecamatan Bayat dengan luas mencapai 205 ha, dan melanda empat desa di Kecamatan Cawas dengan luas 149 ha. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Klaten untuk meninjau dan menyerap aspirasi dari seluruh *stakeholder* dalam mendukung pemulihan dan peningkatan produksi padi di Kabupaten Klaten.

C. Sektor Perikanan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah

1. Potensi perikanan Kabupaten Klaten: Jumlah Sumber Mata Air 174 lokasi dan Rawa 1 lokasi terbanyak kawasan Tulung 24, Manisrenggo 24, Karangnongko 17, Kebonarum 14, Kalikotes dan Prambanan 11, Karanganom dan Ceper 8;
2. Sebaran potensi perikanan d Kabupaten Klaten:
 - a. Waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 170 Ha berada di Kecamatan Bayat;
 - b. Perikanan budi daya pembesaran dan pembenihan dengan luas kurang lebih 31,5 Ha tersebar di beberapa kecamatan antara lain: Kecamatan Bayat, Cawas, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Prambanan dan Kecamatan Tulung;
 - c. Pengembangan budi daya perikanan berbasis sistem kewilayahan/klaster dilaksanakan melalui pengembangan **Kawasan minapolitan I** dengan komoditas ikan nila meliputi Kecamatan Karanganom, Polanharjo dan Kecamatan Tulung. Pengembangan **Kawasan Minapolitan II** dengan komoditas ikan nila, lele, dan ikan hias meliputi Kecamatan Kebonarum, Klaten Selatan, dan Kecamatan Ngawen.
3. Produksi Komoditas Perikanan Budi daya di Kabupaten Klaten dalam 5 tahun terakhir 25.000-30.000 Ton/Tahun dengan kebutuhan benih ikan untuk menunjang proses Budi daya sebesar \pm 140 juta ekor per tahun
 - a. Nila: \pm 17.000 Ton;
 - b. Lele: \pm 8.000 Ton;
 - c. Ikan lain: \pm 5.000 Ton (Gurame, Bawal, Patin).

D. Sejarah Budi Daya Ikan Nila Desa Nganjat, Kec. Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Desa Nganjat, yang terletak di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, memiliki potensi perairan yang sangat luar biasa. Pada awal tahun 1995, usaha budi daya ikan nila merah mulai diperkenalkan. Awalnya dimulai oleh seorang petani, namun hasil yang memuaskan mendorong lebih banyak orang untuk terlibat. Pada masa itu, kolam untuk budi daya nila masih terbatas. Masyarakat kemudian mengembangkan budi daya ikan nila dengan sistem minapadi (memelihara ikan bersama tanaman padi), dan hasilnya cukup positif. Karena pada saat itu hanya satu wilayah di Kabupaten Klaten yang mengadopsi budi daya minapadi intensif, Desa Nganjat didaftarkan untuk mengikuti lomba intensifikasi minapadi tingkat nasional dan berhasil meraih Prestasi Terbaik Tingkat Nasional.

Sejak saat itu, budi daya ikan nila di kolam mulai berkembang, dengan jumlah kolam bertambah menjadi sekitar 10 kolam sederhana. Banyak petani minapadi yang beralih ke budi daya ikan nila di kolam. Namun, munculnya predator alami seperti berang-berang menyebabkan kerugian bagi beberapa petani. Pada tahun 1999, budi daya ikan nila mengalami kevakuman karena manajemen yang belum optimal, tetapi mulai pulih kembali pada tahun 2002. Pemerintah Kabupaten Klaten mendukung pengembangan dengan menyediakan kolam permanen berukuran lebih dari 500 m² di tanah kas desa pada tahun 2003. Pada saat itu, teknologi yang digunakan masih sederhana, sehingga produksi hanya mencapai sekitar 500 kg per 100 m².

Pada tahun 2007, dengan semakin banyak pelaku budi daya dan kebutuhan untuk wadah berbagi informasi, terbentuklah kelompok petani ikan Karya Mandiri. Meskipun belum memiliki SK resmi, kelompok ini mulai mendapatkan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perikanan pada tahun 2008, berupa kolam permanen dengan kapasitas produksi yang lebih baik. Desa Nganjat terus mendapatkan alokasi DAK perikanan karena ketersediaan air yang melimpah. Pada tahun 2009, desa ini ditetapkan sebagai salah satu kawasan Desa Nila, namun sektor

perikanan mengalami kemunduran karena overproduksi ikan nila, terbatasnya pasar, dan kenaikan harga pakan.

Pada tahun 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mulai menunjuk penyuluh perikanan, dan Desa Nganjat ditetapkan sebagai desa percontohan Minapolitan Desa Nila melalui SK dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya dan SK Bupati Klaten. Produksi perikanan budi daya meningkat berkat intensifikasi dengan kepadatan tebar 150-250 ekor per m² dan penggunaan pakan pabrikan, sehingga produksi naik menjadi sekitar 4-6 ton per 100 m². Saat ini, luas areal budi daya ikan di Desa Nganjat mencapai sekitar 10 ha. Pada tahun 2013, desa ini ditetapkan sebagai desa wisata berbasis perikanan yang berorientasi pada pendidikan dan wawasan lingkungan.

III. HASIL KUNJUNGAN

A. Lahan Pertanian di Desa Tumpukan, Kec. Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

1. Paparan dari Pemerintah Kabupaten Klaten

- a. Tahun 2024, Kabupaten Klaten memiliki target tanam seluas 74.765 ha dan sampai bulan Juli mencapai 46.514 Ha, dengan provitas rata-rata kabupaten 64,4 Ku/Ha GKG (Gabah Kering Giling). Untuk pengairan selain dari irigasi teknis, beberapa wilayah juga mengandalkan aliran sungai untuk mendapat air irigasi;
- b. Kabupaten klaten sebagai penyangga pangan terus berusaha meningkatkan produksi padi, salah satunya adalah melakukan inovasi peningkatan produksi dengan varietas padi Rojolele Srinuk. Varietas Rojolele Srinuk merupakan varietas turunan esensial (VTE) dari varietas asalnya yaitu Rojolele, asal Kabupaten Klaten. Pengembangan padi Rojolele Srinuk bertujuan untuk mengembalikan kejayaan padi Rojolele, penyelamatan Plasma Nutfah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Jumlah produksi pada tahun 2024 ini sudah mencapai 237.121 ton GKP dari luas panen

43.113 ha. Dari luas tersebut ada tanaman Rojolele Srinuk 375 ha atau sekitar 1 persen;

- c. Kabupaten Klaten melalui kegiatan perluasan areal tanam dengan menambah indek pertanaman di lahan tadah hujan yang biasanya tanam 1 – 1,5 kali menjadi 2 kali tanam. Dan juga pada wilayah-wilayah sawah irigasi setengah teknis dengan meningkatkan indek pertanaman yang ada. Kabupaten Klaten mendapat target untuk areal PAT adalah 711 Ha dan tersebar di 8 kecamatan. Realisasi tanam sampai tanggal 18 Agustus 2024 seluas 1.129 Ha (158%);
- d. Untuk pengembangan pupuk organik Kabupaten Klaten telah mengembangkan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik) melalui Bantuan Kementerian Pertanian dan juga pemberian bantuan POC (Pupuk Organik Cair) dari tahun 2023 – 2024 Jumlah UPPO yang ada di Kabupaten Klaten dari tahun 2019 – 2024 sejumlah : 46 unit dengan produksi rata-rata mencapai 100 kg/bln per unit. Selain pemberian bantuan Kabupaten Klaten juga melaksanakan program “GELORA NONIK” (Gerak Langkah Ora Lali Nambah Organik);
- e. Bantuan Kementerian Pertanian ke Kabupaten Klaten Tahun 2024 yang sudah tersalurkan, diantaranya: benih padi seluas 13.700Ha, benih jagung seluas 38 Ha, pupuk NPK non subsidi yang digunakan untuk luasan 3.937 Ha, pestisida untuk luasan 3000Ha, pompa air dalam rangka mendukung kegiatan PAT sebesar 92 unit, handtractor roda dua sebanyak 20 unit, dan traktor roda empat sebanyak 9 unit;
- f. Pengembangan dan peningkatan produksi, Pemerintah Daerah juga melakukan Gerak Nonik (Gerakan Langkah Ora Lali Nambah Organik), dalam rangka memperbaiki struktur dan tekstur tanah sehingga perakaran akan menjadi baik dan meningkatkan penyerapan unsur hara tanaman;
- g. Sejak akhir Tahun 2022 hingga saat ini, harga gabah kering panen lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya walaupun setelah lebaran sempat mengalami penurunan. Harga GKP di Kabupaten

Klaten berkisar Rp6500-Rp6900 per kg. Diharapkan harga bisa dipertahankan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; serta

- h. Meminta dukungan listrik agar masuk ke persawahan. Pemerintah Daerah telah berkirim surat ke PLN dan hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

2. Aspirasi Petani

- a. Ketersediaan air tidak ada;
- b. Kuota pupuk subsidi berkurang;
- c. Meminta dukungan dan bantuan Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian, diantaranya:
 - 1) Infrastruktur. Meminta dukungan Talud Jalan Usaha Tani beserta betonisasi;
 - 2) Rehabilitasi saluran irigasi di wilayah Kelompok Tani Dadimulyo maupun Desa Tumpukan Karangdowo guna memperlancar penyaluran air Kawasan pertanian;
 - 3) Meminta dukungan Alat Panen Pertanian yang berukuran besar (*Combine Harvester*) di Desa Tumpukan. Petani pernah mendapatkan alat panen dan hingga saat ini tidak bisa digunakan sehingga kondisinya mangkrak; serta
 - 4) Diharapkan dapat direalisasikan pada Tahun 2024-2025 dalam rangka mendukung percepatan panen padi di Desa Tumpukan.
- d. Meminta dukungan dan bantuan dari Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian, diantaranya:
 - 1) Petani banyak mendapatkan bantuan alsintan seperti 2 unit *Combine Harvester* (posisinya mangkrak dan diharapkan dapat ditukar);
 - 2) Pupuk subsidi penyalurannya lancar dan petani menebus sesuai aturan. Meminta dukungan agar pupuk subsidi diberikan langsung kepada petani melalui rekening masing-masing;

- 3) Pada saat ini Desa Tumpukan Karangdowo sedang musim panen, namun harga gabah menurun. Oleh karena itu, diharapkan HPP untuk ditingkatkan;
- 4) Gapoktan dan Kelompok Tani diharapkan mendapatkan insentif guna meningkatkan kesejahteraan petani; serta
- 5) Meminta dukungan agar seluruh desa di Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan Pemerintah secara merata.



Combine Harvester mangkrak (Bantuan Tahun 2014/2015)

3. Tanggapan Kementerian Pertanian

- a. Kementerian Pertanian akan menginventarisasi dan berkoordinasi dengan Kementerian lainnya terkait dengan aspirasi infrastruktur dan rehab saluran irigasi;
- b. Terkait dengan *combine harvester* besar, Kementerian Pertanian akan melakukan verifikasi jika dibutuhkan. Untuk *combine harvester* yang mangkrak, Kementerian Pertanian akan menarik kembali bantuan tersebut;
- c. Kementerian Pertanian akan segera menindaklanjuti usulan aspirasi petani untuk *combine harvester*, dengan catatan petani harus segera menanam kembali setelah dilakukan pemanenan; serta
- d. Pemerintah Pusat akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan permasalahan dan aspirasi petani.

4. Tanggapan Perum Bulog

Pada mulanya HPP ditetapkan sebesar Rp5.000,00/kg dan telah dinaikkan menjadi Rp6.000,00/kg. Saat ini Perum Bulog memiliki MRMP Sragen dan membeli GKG sebesar Rp.7.000,00/kg. Diharapkan petani dapat menyalurkan ke Perum Bulog Sragen.

5. Tanggapan PT Pupuk Indonesia

Alokasi pupuk subsidi cukup dan total 1,5 juta ton (baru terealisasi 661 ribu ton). Ada beberapa masalah petani yang belum terdaftar dan diharapkan petani yang belum terdaftar atau alokasinya berkurang diharapkan petani melakukan koordinasi dengan penyuluh agar didaftarkan ke Kementerian Pertanian melalui e-RDCK. Pupuk subsidi yang diberikan langsung ke petani, Kementerian Pertanian yang dapat menjawab permasalahan tersebut dikarenakan PT Pupuk Indonesia bertugas untuk menyalurkan pupuk bersubsidi.

Terkait dengan salah/lebih salur pupuk subsidi, di Kabupaten Klaten juga beberapa mengalami permasalahan tersebut dan sudah selesai diatasi.

6. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- a. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan permasalahan dan mendukung seluruh aspirasi petani yang disampaikan saat Kunjungan Spesifik ke Kabupaten Klaten;
- b. Selama petani tidak terikat dengan sistem ijon, petani dapat mencari harga gabah yang tertinggi dan Perum Bulog yang memiliki standar serta kualitasnya harus sesuai (kualitas premium);
- c. Pemerintah Daerah dapat koordinasi dengan Perum Bulog terkait dengan penyerapan gabah petani;
- d. Terkait dengan insentif kelompok, kelompok tani yang mendapatkan bantuan dan dimanfaatkan oleh kelompok dengan mengambil dana insentif, diharapkan dana yang diambil harus lebih rendah. Gapoktan dan Poktan diharapkan memanfaatkan dana

tersebut untuk kas kelompok yang dapat digunakan ketika dibutuhkan; serta

- e. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menarik *combine harvester* 2 unit yang mangkrak dan mengganti alat mesin pertanian sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh gapoktan dan poktan.

B. Kawasan Budi Daya Ikan Air Tawar di Botorejo, Nganjat, Kec. Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan budi daya ikan di Desa Nganjat mencakup seluruh tahapan yang diperlukan, mulai dari pembenihan, pendederan, hingga pembesaran, khususnya untuk ikan nila merah. Hal ini selaras dengan penetapan Desa Nganjat sebagai kawasan minapolitan percontohan untuk budi daya ikan nila.

1. Pembenihan Nila

Pembenihan ikan nila merah di desa ini dilakukan oleh beberapa pembenih. Untuk memastikan kualitas benih, mereka menggunakan induk unggul yang telah diseleksi dari BPBIAT Janti sebagai pusat pembenihan. Induk yang biasanya digunakan adalah induk pandu kunti dan induk nila strain Singapura.

2. Pembesaran Nila

Kegiatan budi daya ikan nila merah di Desa Nganjat memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi perikanan budi daya di Kabupaten Klaten, dengan produktivitas rata-rata mencapai 30 kg/m² dan total produksi ikan lebih dari 400 ton per tahun. Desa ini juga sering menjadi tujuan studi banding dan kunjungan dari berbagai daerah. Umumnya, kolam pembesaran nila di Desa Nganjat adalah kolam air deras dengan debit air sekitar 50-100 liter per detik dan luas rata-rata 100 m². Sumber air untuk budi daya berasal dari mata air Umbul Ponggok dengan debit sekitar 730 liter per detik. Budi daya ikan nila di desa ini termasuk intensif, dengan kepadatan tebar rata-rata 100-200 ekor per m², dan satu kolam seluas 100 m² dapat menghasilkan antara

3 hingga 5 ton ikan konsumsi. Kebutuhan benih gelondong untuk budi daya ikan nila mencapai 3-4 ton per bulan, atau sekitar 180.000 hingga 240.000 ekor benih per bulan, dengan asumsi satu kilogram benih gelondong berisi 60 ekor benih ikan. Untuk sistem budi daya intensif, kebutuhan pakan sekitar 1,5 ton per hari.

Di Desa Nganjat, terdapat 46 pelaku utama budi daya ikan, sebagian di antaranya tergabung dalam kelompok pembudi daya ikan Karya Mandiri yang dipimpin oleh Bapak Hanif Mustofa. Kelompok ini resmi dikukuhkan pada tahun 2011 melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten No. 525/2009/16, tertanggal 25 November 2011. Pada tahun 2022, muncul kelompok baru, yaitu Karya Sejahtera yang dipimpin oleh Bapak Pandu Sujatmoko. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, seperti kenaikan harga pakan ikan yang tajam tanpa diimbangi dengan kenaikan harga ikan, serta tidak adanya asosiasi pembudi daya yang dapat memberikan posisi tawar terhadap fluktuasi harga ikan, para pembudi daya tetap bertahan dalam menjalankan aktivitas budi daya ikan nila. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Selain kegiatan budi daya, Desa Nganjat juga memiliki aktivitas pengolahan hasil, terutama pengolahan ikan nila menjadi berbagai produk seperti abon, nugget, bakso ikan, fillet, stick duri, dan otak-otak. Kegiatan pengolahan ini berkembang seiring dengan banyaknya produksi ikan nila di desa tersebut, yang seringkali mengalami kesulitan dalam pemasaran pada periode tertentu. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mengolah ikan nila menjadi produk bernilai tambah yang dapat dijual dengan harga lebih baik, khususnya saat terjadi kelebihan produk. Oleh karena itu, usaha pengolahan ikan nila pun berkembang, terutama melalui inisiatif ibu-ibu PKK Desa. Hasil olahan ini kemudian dipasarkan di pasar lokal sekitar Klaten serta di luar Klaten, seperti Solo dan Jogjakarta. Pendampingan untuk kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Klaten melalui

Penyuluh Perikanan setempat, Bappeda Kabupaten Klaten, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan baik di tingkat provinsi maupun pusat. Pendampingan ini mencakup dukungan usaha, pelatihan keterampilan, penyuluhan, serta informasi pasar.

3. Permasalahan:

- a. Belum semua UPR menggunakan induk bersertifikat.
- b. Kenaikan harga pakan ikan tidak diiringi kenaikan harga ikan secara signifikan, sehingga menurunkan pendapatan pembudi daya.
- c. Budi daya ikan merupakan kegiatan padat modal, sehingga dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak dan lembaga keuangan.
- d. Pembudi daya mengalami kendala dalam akses permodalan kaitannya dengan agunan.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan permasalahan dan mendukung seluruh aspirasi petani yang disampaikan saat Kunjungan Spesifik ke Kabupaten Klaten;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menarik *combine harvester* 2 unit yang mangkrak dan mengganti alat mesin pertanian sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh gapoktan dan poktan;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu dan mempercepat proses pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) bagi Kelompok Pembudi Daya Ikan;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pelaku perikanan dan memastikan ketersediaan induk, benih, serta pakan

ikan yang unggul murah berkualitas bagi para pembudi daya ikan di seluruh wilayah khususnya di Kabupaten Klaten.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah pada Masa Sidang I Tahun 2024-2025. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Mitra Kerja Komisi IV DPR RI untuk segera menindaklanjuti seluruh aspirasi yang telah disampaikan masyarakat ketika Kunjungan Spesifik ke Kabupaten Klaten. Diharapkan pada Kunjungan Spesifik kali ini, Komisi IV DPR RI dapat mendukung dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Jakarta, Agustus 2024

Ketua Tim,

Ttd.

Ono Surono, S.T.
A-171

MITRA PENDAMPING

1. Kementerian Pertanian

- a. Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan);
- b. Dr. Tedy Dirhamsyah, S.P., M.A.B. (Direktur Pembiayaan Pertanian Ditjen PSP);
- c. FX Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D. (Kepala BPSIP Jawa Tengah).

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- a. Dr. TB. Haeru Rahayu, A.PI. M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya).
- b. Dr. I NYOMAN RADIARTA, S.Pi. M.Sc. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan).
- c. Ir. Ujang Komarudin Asdani Kartamiharja, M.Sc. (Direktur Ikan Air Tawar, Direktorat Jendral Perikanan Budi Daya).
- d. Dr. Rudi Alek Wahyudin (Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan).

3. Badan Pangan Nasional

- a. Dr. Nyoto Suwignyo, M.M. (Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi).

4. Perum Bulog

- a. Purnomo Sinar Hadi (Direktur Human Capital).

5. PT Pupuk Indonesia

- a. Ninis Kesuma Adriani (Direktur Manajemen Resiko PT PI);
- b. Saifullah Lasindrang (Direktur Keuangan Umum dan Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Risiko).

6. ID FOOD

- a. Yossi Istanto (Direktur SDM ID FOOD).

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

Lahan Pertanian di Desa Tumpukan, Kec. Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah



Kawasan Budi Daya Ikan Air Tawar di Botorejo, Nganjat, Kec. Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah





LIPUTAN MEDIA

1. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/51098/t/Musim%20Kemarau%20Tiba,%20Kementan%20Harus%20Fokus%20Peningkatan%20Anggaran%20dan%20Program%20untuk%20Petani>
2. <https://emedia.dpr.go.id/2024/08/26/musim-kemarau-tiba-kementan-harus-fokus-peningkatan-anggaran-dan-program-untuk-petani/>
3. <https://badanpangan.go.id/blog/post/kunjungan-kerja-bersama-komisi-iv-dpr-ri-nfa-terus-mendorong-bulog-serap-produksi-petani-dalam-negeri>
4. <https://www.facebook.com/share/p/VbQsKXdgwJKnGuZo/>